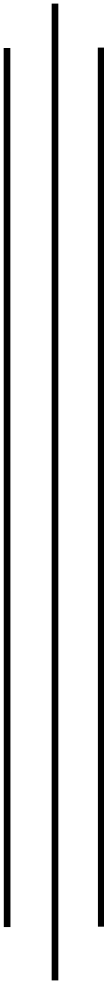


LAMPIRAN XVIII : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2027





**DINAS TENAGA KERJA
PEMERINTAH KOTA BATAM**

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027

Disusun Oleh
**DINAS TENAGA KERJA
KOTA BATAM**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang perencanaan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2027.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam, 17 Juli 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam



Yudi Suprpto, SH., MH
NIP. 197504182002121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah 1

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah 1

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya 2

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah 9

2.2.1 Permasalahan dan Hambatan 9

2.2.2 Tantangan dan Peluang 10

2.2.3 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat
Daerah 11

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 11

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 27

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 27

3.2 Program dan Kegiatan 27

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH . 34

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 45

BAB VI PENUTUP 47

5.1 Catatan Penting 47

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 47

5.3 Rencana Tindak Lanjut 48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU Tahun 2025 ..	8
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun 2025 ...	8
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kota Batam	12
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kota Batam	22
Tabel 2.5	Inovasi Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	26
Tabel 3.1	Target Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2027	27
Tabel 3.2	Keselarasan Renja 2027, Renstra 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan Kebijakan Nasional	31
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027.....	35
Tabel 5.1	Target Indikator Kinerja Utama Disnaker Tahun 2027 dan Target Akhir Tahun 2030	45
Tabel 5.2	Indikator Indikator Kinerja Kunci	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja 2

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029. Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Di dalam Renja berisikan juga evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan perencanaan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja

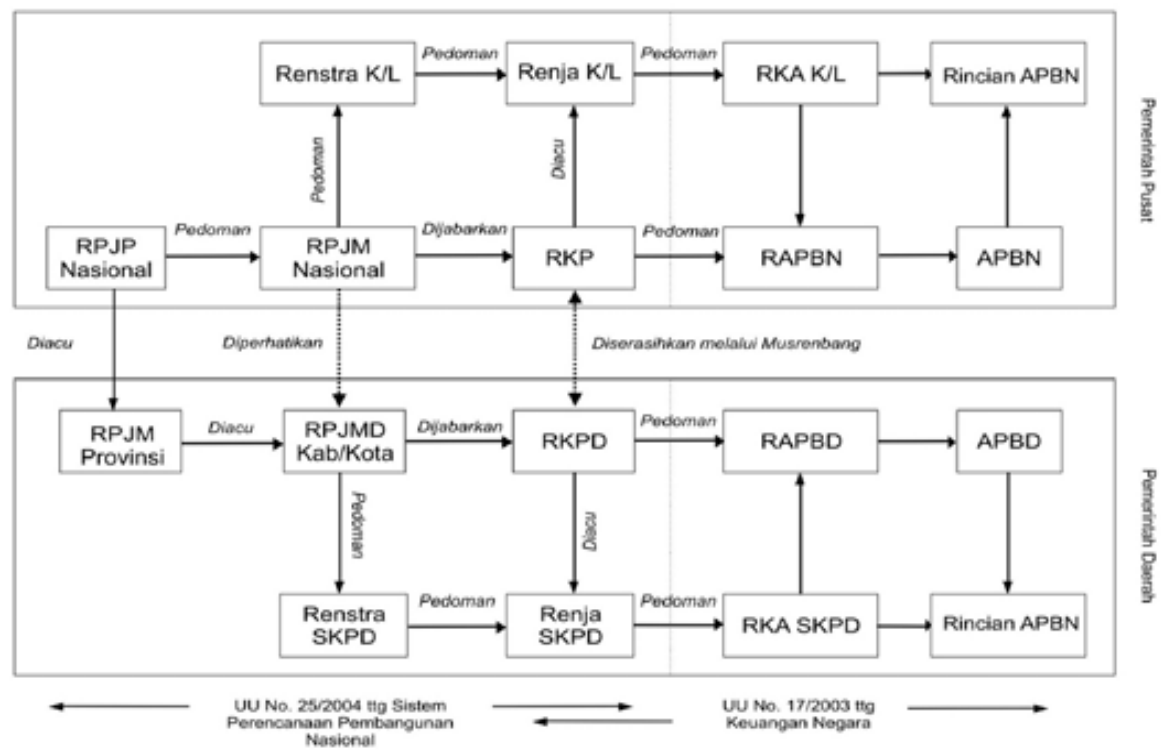


1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 68 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2027 dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Dinas Tenaga kerja Kota Batam Tahun Anggaran 2027.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), Landasan Hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional (3.1). tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah (3.2), program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun (n) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun (n) (3.3).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun (n)

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, yaitu indikator Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dari target 33,44% realisasi 29,77%
 - b. Program Penempatan Tenaga Kerja, yaitu indikator Persentase tenaga kerja yang terserap/ditempatkan dari target 72% realisasi 59,33%
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu: indikator: Nilai SAKIP OPD target 67,29 realisasi 67,29.
 - b. Program Perencanaan Tenaga Kerja yaitu indikator Persentase Data Sektoral Ketenagakerjaan yang mencakup dalam profil target 100% realisasi 100%.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya beberapa target indikator kinerja adalah:
 - a. Penyebab tidak tercapainya Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah :
 1. Perencanaan dan Desain Program yang Kurang Tepat.
 2. Sumber daya dan sarana prasarana terbatas
 3. Faktor peserta pelatihan :
 - Rendahnya motivasi dan kesiapan peserta (hanya mengikuti pelatihan karena syarat bantuan sosial, bukan keinginan untuk meningkatkan kemampuan.
 - Perbedaan tingkat kemampuan dasar peserta yang tidak disesuaikan saat seleksi masuk, sehingga penyampaian materi tidak efektif.
 - b. Penyebab tidak tercapainya Program Penempatan Tenaga Kerja :
 1. Ketidaksesuaian pasar kerja
 2. Hambatan pada pencari kerja
 3. Hambatan dari pemberi kerja
 4. System dan Lembaga penempatan yang belum efektif
 5. Factor kebijakan dan ekonomi

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya beberapa target indikator kinerja adalah:

- b. Perencanaan yang matang dan realistis
- c. Komitmen dan dukungan pimpinan
- d. SDM yang cukup secara jumlah dan memiliki kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawab
- e. Alokasi anggaran yang memadai dan tepat waktu
- f. Koordinasi dan kerja sama yang efektif
- g. Lingkungan kerja yang kondusif

Faktor-faktor penyebab realisasi melebihi target pada indikator kinerja adalah meningkatnya efektivitas layanan administrasi dan dukungan manajemen, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kesekretariatan, peningkatan kompetensi dan komitmen SDM, serta koordinasi internal dan monitoring pelayanan yang semakin optimal.

- 4. Implikasi yang timbul dari capaian program Renstra Dinas Tenaga kerja Kota Batam terhadap capaian sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah menunjukkan bahwa arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan daerah telah berada pada jalur yang tepat, sehingga berimplikasi langsung pada peningkatan capaian sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, penguatan peran Dinas Tenaga Kerja sebagai motor pengendali perencanaan.
- 5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
 - a. Terhadap indikator yang telah tercapai sesuai target: dilakukan penguatan konsistensi perencanaan dan penganggaran melalui pemeliharaan kualitas perencanaan, penajaman indikator kinerja, serta pengalokasian anggaran yang proporsional guna menjaga keberlanjutan capaian kinerja dan mencegah penurunan kinerja pada periode berikutnya.
 - b. Terhadap indikator yang belum tercapai target: dilakukan penyesuaian strategi perencanaan dan penganggaran melalui reviu target dan indikator kinerja, penguatan intervensi program/kegiatan yang berdampak langsung pada sasaran, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pengalokasian anggaran yang lebih fokus dan berbasis prioritas.
 - c. Terhadap indikator yang melebihi target: dilakukan evaluasi atas penetapan target dan asumsi perencanaan, penajaman target kinerja pada periode berikutnya, serta replikasi praktik baik (*best practice*) dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar capaian kinerja tetap efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2027 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
1	Peningkatan kesempatan Kerja	Persen	90.05	92	100	93.16
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Tenaga Kerja	Indeks	90.42	90,60	100	92.35
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - TPAK	Persen	70.489	68.70	97	71.117

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	56	100	100	56
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	1.3183	-	-	1.3598
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	34.33	-	-	46.87
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	99.06	43.32	44	99.81
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	Persen	82.89	61.46	74.14	88.58

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan dan Hambatan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya **Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Keterbatasan Jumlah dan Kompetensi SDM dibandingkan dengan tingginya kebutuhan pelayanan;
2. Meningkatnya volume pelayanan;
3. Digitalisasi layanan yang masih memerlukan penguatan sistem dan peningkatan kemampuan pegawai;
4. Koordinasi lintas bidang dan dengan instansi lain agar pelayanan kepada masyarakat dan perusahaan lebih efektif;
5. Pengelolaan data ketenagakerjaan yang perlu terus diperbaharui agar menjadi dasar pengambilan kebijakan yang akurat.

B. Permasalahan Eksternal

1. Tingginya angka pencari kerja;
2. Kesenjangan Kompetensi Tenaga Kerja;
3. Perubahan Kebutuhan Dunia Industri;
4. Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Masih adanya praktik rekrutmen yang tidak sesuai ketentuan;
6. Dinamika investasi dan kondisi ekonomi global;
7. Meningkatnya kebutuhan pelayanan digital.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Tenaga Kerja Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang – undangan;
2. Didukung aparatur yang memiliki pengalaman dalam pelayanan ketenagakerjaan, hubungan industrial, dan penempatan tenaga kerja;
3. Memiliki jaringan kerja sama dengan perusahaan, kawasan industri, lembaga pelatihan kerja, serta instansi pemerintah lainnya;
4. Tersedianya layanan ketenagakerjaan berbasis digital untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
5. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia belum sepenuhnya sebanding dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan ketenagakerjaan;
2. Sarana dan Prasarana pelayanan serta pelatihan kerja masih memerlukan peningkatan dan modernisasi;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data ketenagakerjaan;

4. Keterbatasan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program pembinaan tenaga kerja dan hubungan industrial;
5. Belum optimalnya koordinasi lintas bidang dan monitoring terhadap pelaksanaan program;
6. Masih perlunya peningkatan kompetensi aparatur dalam menghadapi perkembangan regulasi dan kebutuhan dunia industri.

2.2.2 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam terdapat beberapa **tantangan** yang harus dihadapi yaitu:

1. Kondisi Pasar Tenaga Kerja yang dinamis :
 - a. Jumlah Pencari kerja terus meningkat : Setiap tahun bertambah lulusan sekolah/akademi dan pendatang yang mencari pekerjaan ke Batam
 - b. Ketidaksesuaian keterampilan (ketimpangan kualifikasi) : lulusan belum memiliki keahlian yang dibutuhkan industri
 - c. Persaingan dengan tenaga kerja asing
2. Kebutuhan industri yang berubah cepat :
 - a. Batam didominasi industri manufaktur, jasa, perdagangan dan teknologi, kebutuhan keahlian berubah seiring perkembangan teknologi dan investasi baru
 - b. Banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja bersertifikat kompetensi, namun jumlahnya masih terbatas
3. Keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana :
 - a. Anggaran operasional : sering tidak cukup untuk memperluas layanan, pelatihan dan sosialisasi
 - b. Sarana layanan : akses layanan di beberapa wilayah pinggiran masih terbatas, sistem informasi belum terintegrasi sepenuhnya
4. Masalah ketenagakerjaan yang beragam :
 - a. Pekerja sektor informal : jumlahnya cukup besar dan belum terjangkau perlindungan hukum serta jaminan sosial
 - b. Perselisihan Hubungan Industrial : Masih terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang butuh penanganan cepat dan adil
5. Koordinasi dan Sinergi antar pihak :
 - a. Koordinasi antara disnaker, sekolah/lembaga pelatihan, asosiasi pengusaha dan instansi terkait belum selalu optimal
 - b. Penyebaran informasi lowongan kerja dan program pelatihan belum merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa **peluang** yang dapat mengembangkan pelayanan pada Dinas Tenaga kerja Kota Batam yaitu:

1. Posisi strategis Batam sebagai pusat investasi dan industri
2. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah;
3. Pemanfaatan teknologi dan system informasi;
4. Ketersediaan sumber daya manusia muda;
5. Kerjasama dengan berbagai pihak;
6. Perluasan Jangkauan ke sektor informal.

2.2.3 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritis, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam antara lain:

1. Tingginya tingkat pengangguran terutama pada kelompok usia produktif dan lulusan baru yang belum sepenuhnya terserap oleh dunia kerja;
2. Kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sehingga masih terdapat ketidaksesuaian antara pencari kerja dan lowongan yang tersedia;
3. Belum optimalnya kualitas dan jangkauan pelatihan kerja serta sertifikasi kompetensi yang mampu menjawab perkembangan teknologi dan kebutuhan industri;
4. Perubahan kebutuhan pasar kerja akibat transformasi digital dan perkembangan industri yang menuntut peningkatan keterampilan dan alih keterampilan;
5. Masih terbatasnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan berbasis digital, termasuk penyediaan informasi pasar kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pengaduan hubungan industrial;
6. Dinamika hubungan industrial yang memerlukan peningkatan pembinaan, pengawasan, dan penyelesaian perselisihan secara efektif untuk menjaga iklim investasi yang kondusif;
7. Perlindungan tenaga kerja, khususnya pekerja rentan, pekerja perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja sektor informal, yang masih perlu ditingkatkan;
8. Belum optimalnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan kerja, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan sumber daya manusia dan penempatan tenaga kerja;
9. Keterbatasan sumber daya organisasi, baik dari sisi anggaran, sarana prasarana, maupun kompetensi aparatur, yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan ketenagakerjaan;
10. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2028 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

No.	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan (RANHIR 2027)					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat ata n Pen ting
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
	DINAS TENAGA KERJA				56.948.212.439	DINAS TENAGA KERJA				52.912.556.278	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				56.948.212.439	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				52.912.556.278	
	PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				56.948.212.439	PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				52.912.556.278	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan: Nilai)	73.56%	16.051.543.49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan: Nilai)	73.56%		
			Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan: Nilai)	98%				Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan: Nilai)	98%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	23.612.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	14.122.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.612.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	9.742.500	

No.	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan (RANHIR 2027)					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat ata n Pen ting
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.380.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		12.867.466.392	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	12.371.426.107	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12.785.106.392	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	12.290.066.107	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		82.360.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	81.360.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		320.053.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	223.587.500	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		141.750.000,	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63 Paket	45.202.500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		178.303.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	178.385.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		595.231.803	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	538.788.500	

No.	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan (RANHIR 2027)					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat ata n Pen ting
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		11.254.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.606.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		121.324.313	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	115.535.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		156.604.625,	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	123.638.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.470.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		300.648.865	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	290.538.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		1.376.757.800,	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	1.381.352.800	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		200.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	353.833.800	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		351.094.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	281.409.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		285.366.840,	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	494.674.800	

No.	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan (RANHIR 2027)					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat atan Penting
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		285.366.840	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	259.424.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	235.250.400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		583.055.659	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	1.068.390.000,0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		242.249.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	220.390.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		73.370.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	66.700.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		85.648.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit	81.570.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan (RANHIR 2027)					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat ata n Pen ting
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		121.788.159	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	599.730.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		484.095.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	746.110.000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		36.763.185.646	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	64,70%	32.011.248.971,	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina		150.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	40%	198.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		150.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	198.000.000	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Pekerja yang terfasilitasi dalam peningkatan Produktivitas.		17.364.134.039	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Pekerja yang terfasilitasi dalam peningkatan Produktivitas.	44,29%	12.313.120.012	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		17.364.134.039	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1700 Dokumen	12.313.120.012	

No.	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan (RANHIR 2027)					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat ata n Pen ting
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		19.249.051.607	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50,21%	19.500.128.959	
	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		19.249.051.607	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	2000 Orang	19.500.128.959	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan		1.131.332.299	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan	75%	1.905.542.500	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase angkatan kerja (orang yang bekerja dan pencari kerja) yang terlayani		641.721.400	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase angkatan kerja (orang yang bekerja dan pencari kerja) yang terlayani	54%	996.986.900	
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi		300.000.000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	100 Orang	58.225.600	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		100.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	4000 Orang	100.000.000	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		160.536.800	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	25 Orang	150.572.700	

No.	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan (RANHIR 2027)					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat ata n Pen ting
	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		81.184.600	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang	688.188.600,	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja		301.255.999	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	79,01%	764.992.400	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		183.005.999,	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2300 Orang	215.839.800	
	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		118.250.000	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	2000 Orang	549.152.600	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI		188.354.900	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI	54,55%	143.563.200	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		188.354.900	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	500 Orang	143.563.200	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan		3.002.151.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	41,83%	2.903.422.600	

No.	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan (RANHIR 2027)					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat ata n Pen ting
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian pengesahan peraturan, perjanjian kerja hubungan industri dan jaminan sosial serta pengupahan perusahaan tenaga kerja		604.200.000,	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian pengesahan peraturan, perjanjian kerja hubungan industri dan jaminan sosial serta pengupahan perusahaan tenaga kerja	44,76%	541.008.000	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	220 Perusahaan	187.000.000						
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	20 Perusahaan	30.000.000						
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	387.200.00	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	462.326.800	

No.	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan (RANHIR 2027)					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat ata n Pen ting
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah		30.000.000,	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	110 Perkara	63.610.000,	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	200 Perkara	24.336.000	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	487.432.100	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial serta bantuan iuran JKK dan JKM		2.397.951.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial serta bantuan iuran JKK dan JKM	38,90%	2.362.414.600	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	9900 Orang	1.692.929.500	

No.	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan (RANHIR 2027)					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat atan Penting
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	94.107.000	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *top down* dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjarangan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2027 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Batam	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		
1.1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Batam	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Batam	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		
	Pelatihan Tata Boga	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Operator Komputer	Kota Batam		60 Orang	
	Pelatihan Operator Komputer Menjadi AutoCad	Kota Batam		30 Orang	
	Pelatihan welder	Kota Batam		15 Orang	
	Pelatihan Web Programming	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Menjahit	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Petugas K3	Kota Batam		23 Orang	
	Pelatihan Welder Dasar / Las 2G FCAW	Kota Batam		17 Orang	
	Pelatihan menjahit baju mode	Kota Batam		15 Orang	
	Pelatihan Fitter pipe	Kota Batam		18 Orang	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pelatihan Menjahit	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Ahli K3 Umum	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Jasa Boga Pengolahan kue Indonesia dan Oriental	Kota Batam		25 Orang	
	Pelatihan Tata Boga Bakery	Kota Batam		25 Orang	
	Pelatihan Tata rias pengantin	Kota Batam		25 Orang	
	Pelatihan Tata Rias Salon Kecantikan	Kota Batam		25 Orang	
	Pelatihan welder 3G/4G	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan welder dasar	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan untuk pencaker security garda pratama	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Rigger	Kota Batam		30 Orang	
	Pelatihan Welder CAS 6 G FCAW	Kota Batam		15 Orang	
	Pelatihan K3 Migas Operator	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Welder 3G SMAW	Kota Batam		15 Orang	
	Pelatihan Las 4G SMAW	Kota Batam		10 Orang	
	Pelatihan Penjahit Baju Mode	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Accounting Level 1	Kota Batam		30 Orang	
	Pelatihan Memasak atau Tata Boga	Kota Batam		30 Orang	
	Pelatihan MUA atau Pengantin	Kota Batam		30 Orang	
	Pelatihan Bahasa Inggris	Kota Batam		30 Orang	
	Pelatihan Tata rias salon kecantikan	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan 5G SMAW	Kota Batam		15 Orang	
	Pelatihan Gerinda	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Sertifikasi Pekerja (Bahasa Jepang)	Kota Batam		15 Orang	
	Pelatihan dan Sertifikasi Operator K3	Kota Batam		25 Orang	
	Pelatihan Ketenagakerjaan Welding Dapil III	Kota Batam		15 Orang	
	Pelatihan dan sertifikasi hiperkes paramedis	Kota Batam		30 Orang	
	Pelatihan Kerja Las 6G SMAW dan Welder 5G SMAW	Kota Batam		25 Orang	
	Pelatihan Teknisi AC Residential level 1	Kota Batam		15 Orang	
	Pelatihan Menjahit Tata Busana	Kota Batam		25 Orang	
	PELATIHAN LAS 5G/6G	Kota Batam		30 Orang	
	PELATIHAN MENJAHIT TATA BUSANA	Kota Batam		50 Orang	
	Pelatihan Bagi Pencari Kerja PELATIHAN KECANTIKAN	Kota Batam		20 Orang	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pelatihan Bagi Pencari Kerja PELATIHAN TATA BOGA	Kota Batam		15 Orang	
	PELATIHAN FITTER PIPE	Kota Batam		10 Orang	
	PELATIHAN MENJAHIT	Kota Batam		20 Orang	
	PELANTIKAN WELDER 5G PIPE SMAW	Kota Batam		10 Orang	
	Pelatihan Fitter Pipe	Kota Batam		28 Orang	
	Pelatihan Las 3G SMAW	Kota Batam		15 Orang	
	Pelatihan Welder Dasar	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Las 5G /6G	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Scaffolding	Kota Batam		75 Orang	
	Pelatihan Sertifikasi Operator Forklift	Kota Batam		55 Orang	
	Pelatihan Sertifikasi Welding	Kota Batam		31 Orang	
	Sertifikasi Security	Kota Batam		29 Orang	
	Pelatihan Electrical Technican	Kota Batam		14 Orang	
	Pelatihan Menjahit / Pembuatan Pakaian Tata Busana (Garmen)	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Teknisi AC Residential (Pendingin)	Kota Batam		20 Orang	
	PELATIHAN LAS 6G FCAW	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Barista	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Autocad (Desain Grafis)	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan tata rias rambut	Kota Batam		30 Orang	
	Pelatihan Menjahit Garmen	Kota Batam		15 Orang	
	PELATIHAN SPA TERAPIS	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Menjahit Garmen (OperatorJunior)	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Las 6G SMAW	Kota Batam		14 Orang	
	Pelatihan Las 3G FCAW	Kota Batam		14 Orang	
	Pelatihan Tata Boga Pastry (Pelatihan Pengelolaan Makanan)	Kota Batam		20 orang	
	Pelatihan Las 4G FCAW	Kota Batam		14 Orang	
	Pelatihan Bartender	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Pencari Kerja (jasa Boga Kue Oriental)	Kota Batam		50 Orang	
	Pelatihan Peningkatan Keahlian (Bimtek) Welder 4 GFCAW	Kota Batam		20 Orang	
1.2	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Jumlah Pekerja yang terfasilitasi dalam peningkatan Produktivitas		
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Tenaga Kerja		dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		
	Bimtek dan Sertifikasi Microsoft Office Specialist (MOS)	Kota Batam		30 Orang	
	Sertifikasi Keahlian Tenaga Kerja Bimtek AK3 Muda	Kota Batam		20 Orang	
	Program Pelatihan Public Speaking MC	Kota Batam		22 Orang	
	Bimtek dan sertifikasi Tour Leader Wisata	Kota Batam		20 Orang	
	Bimtek dan Sertifikasi Tour Guide Wisata	Kota Batam		20 Orang	
	Pelatihan Konten Kreator	Kota Batam		40 Orang	
	FITTER PIPE	Kota Batam		22 Orang	
	BIMTEK DAN SERTIFIKASI LAS 5G FCAW	Kota Batam		12 Orang	
	BIMTEK DAN SERTIFIKASI WELDER 4 FCAW	Kota Batam		25 Orang	
	BIMTEK DAN SERTIFIKASI WELDER 3G SMAW	Kota Batam		15 Orang	
	BIMTEK DAN SERTIFIKASI WELDER 4G SMAW ATAU SCAW	Kota Batam		37 Orang	
	BIMTEK DAN SERTIFIKASI WELDER 5G SMAW	Kota Batam		37 Orang	
	PELATIHAN MEMBUAT KONTEN	Kota Batam		30 Orang	
	Bimtek dan Sertifikasi House Keeping Room Attendant	Kota Batam		50 Orang	
	House Keeping Publick Area Cleaner	Kota Batam		42 Orang	
	BIMTEK WELDER 6 G SMAW DAN FCAW	Kota Batam		15 Orang	
	Bimtek dan Sertifikasi Ahli K3 Umum	Kota Batam		124 Orang	
	Bimtek dan Sertifikasi Tour Guide Wisata	Kota Batam		30 Orang	
	Bimtek dan Sertifikasi SPA Terapis	Kota Batam		25 Orang	
	Bimtek dan Sertifikasi Teknisi Kelistrikan	Kota Batam		40 Orang	
	BIMTEK FORKLIP	Kota Batam		20 Orang	
	Bimtek Scaffolding	Kota Batam		28 Orang	
	BIMTEK TEKNISI K3 LISTRIK	Kota Batam		20 Orang	
	Bimtek dan Sertifikasi Barista UMKM	Kota Batam		20 Orang	
	Bimtek dan Sertifikasi IT Auditor	Kota Batam		21 Orang	
	Bimtek dan Sertifikasi Tour Guide	Kota Batam		30 Orang	
	Bimtek dan Sertifikasi Front Office Supervisor	Kota Batam		20 Orang	
	PELATIHAN BIMTEK PITTER	Kota Batam		30 Orang	
	PELATIHAN BIMTEK OPERATOR KOMPUTER	Kota Batam		31 Orang	

2.5 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

Tabel 2.5 Inovasi Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Inovasi	Jenis	Permasalahan	Manfaat	Outcame
"Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia" Khususnya sasaran menurunkan pengangguran dan memperluas kesempatan kerja	Tenaga Kerja	Simnaker	Digital	1. Masalah Teknis : ketidaksinkronan data dengan dukcapil, gangguan sistem, daftar pilihan data tidak lengkap dan proses verifikasi lambat. 2. Kepatuhan Perusahaan : Rendahnya pelaporan lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja sesuai aturan, serta lemahnya pengawasan penindakan 3. Pemanfaatan belum optimal 4. Sistemik dan administrasi : belum terintegrasinya dengan sistem BP Batam, serta pembatasan pendaftaran bagi pencari kerja luar daerah	1. Bagi Pencari Kerja : Akses aman, cepat dan terpusat ke lowongan kerja resmi, layanan AK1 daring serta peluang prioritas bagi warga lokal 2. Bagi Perusahaan : Mempermudah kewajiban pelaporan, mempercepat rekrutmen kandidat yang tervalidasi dan menjamin proses yang transparan. 3. Bagi Pemerintah : Menyediakan data ketenagakerjaan yang akurat sebagai dasar perencanaan program, memperkuat pengawasan serta mewujudkan layanan publik yang lebih efisien dan digital	1. Capaian nyata : terdaftar ratusan perusahaan dan puluhan ribu pencari kerja, mendorong penyerapan tenaga kerja lokal yang signifikan serta melampaui target penempatan kerja yang ditetapkan 2. Dampak Langsung : Mempercepat proses pencarian dan rekrutmen kerja, menjamin keamanan serta transparansi informasi lowongan dan memudahkan layanan administrasi AK1 secara daring 3. Dampak sistematik : menyediakan data ketenagakerjaan yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap aturan, mendukung penurunan angka pengangguran, serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien dan berbasis digital

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan dari Dinas Tenaga kerja Kota Batam adalah **“Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja”**.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan;
- b. Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Kerja, Pemerataan Kesempatan Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Pekerja;

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2027 mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Daerah
Tahun 2027**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2027
2	3	4	8
Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		Peningkatan kesempatan kerja	92,81%
	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Tenaga Kerja	90,48%
	Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Kerja, Pemerataan Kesempatan Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Pekerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja- TPAK	70,803%

3.2 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2027 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 yang dirinci dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-3 Kota Batam Tahun 2025-2029 dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2027 Dinas Tenaga Kerja mengusulkan 5 (lima) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, 41 (empat puluh satu) sub kegiatan, dengan

kebutuhan dana sebesar **Rp. 52.912.556.278** (lima puluh dua milyar sembilan ratus dua belas juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah). Adapun program dan kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1.

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**
- 1.1

**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah**
- 1.1.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.2.1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.3

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1.3.1

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.3.2

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4

Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.4.1

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.4.2

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.4.4

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
- 1.4.5

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
- 1.5

**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah**
- 1.5.1

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.5.2

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.5.3

Pengadaan Mebel
- 1.5.4

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.5.5

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.5

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.5.1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.5.2

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6

**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah**

- 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.6.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

- 2.1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - 2.1.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- 2.2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - 2.2.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 2.3 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.3.1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

3.
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

- 3.1 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/KotaPerangkat Daerah
 - 3.1.1 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
 - 3.1.2 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - 3.1.3 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - 3.1.4 Perluasan Kesempatan Kerja
- 3.2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - 3.2.1 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - 3.2.2 Job Fair/Bursa Kerja
- 3.3 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

4.
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

- 4.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 4.1.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- 4.1.2 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
- 4.1.3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan

4.2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- 4.2.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 4.2.2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 4.2.3 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- 4.2.4 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Tabel 3.2 Keselarasan Renja 2027, Renstra 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional

Renstra 2025-2029	Pagu	Renja 2027	Pagu	RKPD	Pagu	Kebijakan Nasional	Pagu
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	36.763.185.646	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	32.011.248.971	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	32.011.248.971	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif	32.105.355.971,00
						Prioritas 1 Pengembangan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang Berkualitas dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	
						Dukungan Program RKPD Tahun 2027 terhadap Aspek Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dalam Penanggulangan Kemiskinan	19,594,235,959

Renstra 2025-2029	Pagu	Renja 2027	Pagu	RKPD	Pagu	Kebijakan Nasional	Pagu
Program Penempatan Tenaga Kerja	1.154.764.300	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.905.542.500	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.905.542.500	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1.905.542.500,00
						Prioritas 1 Pengembangan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang Berkualitas dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	
						Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	1.154.764.300,00
						Dukungan Program RKPD Tahun 2027 terhadap Aspek Tematik, Holistik,	838,761,300

Renstra 2025-2029	Pagu	Renja 2027	Pagu	RKPD	Pagu	Kebijakan Nasional	Pagu
						Integratif dan Spasial (THIS) dalam Penanggulangan Kemiskinan	
Program Hubungan Industrial	3.002.151.000	Program Hubungan Industrial	2.903.422.600	Program Hubungan Industrial	2.903.422.600	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.	2.809.315.600,00
						Prioritas 1 Pengembangan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang Berkualitas dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	
						Dukungan Program RKPD Tahun 2027 terhadap Aspek Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dalam Penanggulangan Kemiskinan	2,155,256,300

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2027 memasuki tahun ke-3 Renstra Tahun 2025-2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk Tahun 2027 dilaksanakan melalui 5 (lima) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, 41 (empat puluh satu) sub kegiatan, beserta usulan pendanaan (pagu indikatif) tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi	Daerah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			52.912.556.278								62.331.913.793			
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			52.912.556.278								62.331.913.793			
					DINAS TENAGA KERJA			52.912.556.278								62.331.913.793			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN D A E R A H K A B U P A T E N / K O T A	Nilai SAKIP PD	76,56	73,56 Nilai	16.092.342.207							74,56	17.158.589.164	Dinas Tenaga Kerja	
						Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD	100	98 Nilai								99		Dinas Tenaga Kerja	
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		100 %	14.122.500							100	23.612.000	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	9.742.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota	2	13.612.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	4.380.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota	3	10.000.000	Dinas Tenaga Kerja

Kode Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi	Daerah					
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100 %	12.371.426.107							100	14.328.949.393	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		6 5 Orang/bulan	12.290.066.107	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota	67	14.245.589.393	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	81.360.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota	12	83.360.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		100 %	223.587.500							100	320.053.000	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		63 Paket	45.202.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota	63	141.750.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		7 Orang	178.385.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota	11	178.303.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100 %	538.788.500							100	650.310.463	Dinas Tenaga Kerja	

								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi	Daerah					
2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	746.110.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota		0	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	0	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota	1	341.568.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		40 Unit	353.833.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota	40	210.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		27 Unit	281.409.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota	27	351.094.800	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100 %	494.674.800								100	313.903.524	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	259.424.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota	12	313.903.524	Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	235.250.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	0	0	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100 %	1.068.390.000							100	619.097.984	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4 Unit	220.390.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota	6	266.671.900	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	66.700.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota	3	80.707.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		106 Unit	81.570.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota	106	89.930.925	Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi		3 Unit	599.730.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota	3	121.788.159	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi		5 Unit	100.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota	3	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	99,33	64.70 %	32.011.248.971								81.79	40.828.299.329	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		50.21 %	19.500.128.959								66.42	21.836.831.037	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		2000 Orang	0	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota dan Masyarakat	2000	21.836.831.037	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.01	0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		2000 Orang	19.500.128.959	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Masyarakat Kota Batam	0	0	Dinas Tenaga Kerja

					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub	Target Akhir Periode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional	Provinsi			Daerah			
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina		40 %	198.000.000							60	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		20 Lembaga	198.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan kebutuhan dunia industri	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri	-Kemiskinan	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	25	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pekerja yang terfasilitasi dalam peningkatan Produktivitas.		44.29 %	12.313.120.012							61.88	18.841.468.292	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		1241 Dokumen	12.313.120.012	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan kebutuhan dunia industri	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota dan Masyarakat	1800	18.841.468.292	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan	78.00	75.00 %	1.905.542.500							76.50	1.265.514.300	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkatan kerja (orang yang bekerja dan pencari kerja) yang terlayani		54 %	996.986.900							56	691.721.400	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi		100 Orang	58.225.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan kebutuhan dunia industri	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota dan Masyarakat	100	310.000.000	Dinas Tenaga Kerja

								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi	Daerah					
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		4000 Orang	100.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota dan Masyarakat	4400	110.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		25 Orang	150.572.700	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri	-Kemiskinan	Pemerintah Kota dan Masyarakat	25	175.536.800	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		30 Orang	688.188.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri	-Kemiskinan	Pemerintah Kota dan Masyarakat	30	96.184.600	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja		79.01 %	764.992.400								81.24	377.938.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		0 Dokumen	0	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota dan Daerah	1	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		2200 Orang	215.839.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota dan Masyarakat	2300	156.438.000	Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		2000 Orang	549.152.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota dan Masyarakat	2000	146.500.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	C a k u p a n p e n y e b a r l u a s a n informasi perlindungan CPMI dan PMI		54,55 %	143.563.200							56,52	195.854.900	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		500 Orang	143.563.200	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota dan Masyarakat	500	195.854.900	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	79,55	41,83 %	2.903.422.600							60,31	3.079.511.000	Dinas Tenaga Kerja	
						Persentase Pekerja Rentan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan	78,90	39,14 Persentase								58,92		Dinas Tenaga Kerja	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian pengesahan peraturan, perjanjian kerja hubungan industrial dan jaminan sosial serta pengupahan perusahaan tenaga kerja		44,76 %	541.008.000							61,86	640.560.000	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		220 Perusahaan	50.321.200	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota dan Masyarakat	240	204.000.000	Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		2 0 Perusahaan	28.360.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota B a t a m 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota dan Masyarakat	20	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		1 Laporan	462.326.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota B a t a m 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri	-Kemiskinan	Pemerintah Kota dan Masyarakat	1	406.560.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial serta bantuan iuran JKK dan JKM		38,90 %	2.362.414.600							58,76	2.438.951.000	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		110 Perkara	63.610.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota B a t a m 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota dan Masyarakat	120	81.410.400	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		200 Perkara	24.336.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota B a t a m 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota dan Masyarakat	200	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	94.107.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota dan Masyarakat	0	0	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1 Lembaga	487.432.100	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri		Pemerintah Kota dan Masyarakat	1	221.091.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		9900 Orang	1.692.929.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri	-Kemiskinan	Pemerintah Kota dan Masyarakat	10000	2.121.449.600	Dinas Tenaga Kerja
					TOTAL:					52.912.556.278		62.331.913.793							

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2027 diwujudkan melalui indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator kinerja tersebut disusun sebagai dasar pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan target kinerja Tahun 2027 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Batam Tahun 2025–2029, selaras dengan target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027, serta mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2026. Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, sinkronisasi kebijakan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2027 meliputi:

Tabel 5.1 Target Indikator Kinerja Utama Disnaker Tahun 2027 dan Target Akhir Tahun 2030

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027	Target Akhir 2030
	Indek Pelayanan Publik	Nilai	4,69	4,7	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Tenaga Kerja	Indeks	90,60	90,48	92,39
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,57	7,09	
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja- TPAK	%	68,39	70,803	71,274

Tabel 5.2 Indikator Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	100	100
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	195,56	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	43.32	

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	Persen	80,01	

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada Tahun 2027 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

5.1 Catatan Penting

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2027, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2027 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2027 terdiri atas 5 (lima) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, 41 (empat puluh satu) sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2027, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2027.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025-2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah

tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah.

2. Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2027 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2027.

Demikian Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam pelayanan perencanaan pembangunan daerah.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD